

UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITIC SCIENCE  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE  
POSTGRADUATE PROGRAM  
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAMME  
MAJOR IN ADMINISTRATIVE AND TAXATION POLICY

## ABSTRACT

FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI  
690503088X

POLICY OF DIRECTORATE-GENERAL OF TAXATION TO ACHIEVE 10  
MILLION IDENTIFICATION OF TAXPAYER NUMBER TARGET

[xii, 123 pages, 3 Tables, 2 Attachments, 6 Drawings, Bibliografi: 43 Literature Books, 10 Legislation, 2 Newspapers, 5 Websites, (1953-2008)]

This research was talked about policy of directorate-general of taxation on target achievement of 10 million identification of taxpayer number. The research was evaluating of policy implementation, includes the policy that had made by directorate-general of taxation to achieve the goals, and also what were factors impluance on target achievement of 10 million identification of taxpayer number policy.

The research object was directorate-general of taxation. Using positivist social science approach and kualitatif deiscription method, which means not to analyze the causality between researched aspect and also doing library research, field observation and interviews with a very competent source to collect the data.

The research objective was to analyze the effectiveness of policy implementation of achievement of 10 million identification of taxpayer number policy. This analyze based on four main factors have influenced the effectiveness of policy implementation according Edward III (1980:9). These four main factors are communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure.

Related with these factors or variables, the goal of this research, as follows: describing policy implementation of achievement of 10 million identification of taxpayer number policy, describing the influence of the factor upon the effectiveness of policy implementation of achievement of 10 million identification of taxpayer number policy.

The result from this research shows that role of directorate-general of taxation on target achievement of 10 million identification of taxpayer number policy, the hardest job was to increase the citizen awareness to the state taxation. Factors such as resources, dispositions or attitudes and bureaucratic

structure was not significantly influence to policy implementation of achievement of 10 million identification of taxpayer number policy, except communication aspect was not totally effective to achieve the goals. Even from the number of identification of taxpayer number have been achieved, but there are a lot of question about data accuracy.

In accordance with the result of research, directorate-general of taxation, continuity has to socialite to all the citizen of the importance of tax for the country, make the information system about data base of taxpayer which should be up date in certain times, and also give privileges for the registered taxpayer.



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

## ABSTRAK

FIKRI ERRYDIAN SYAHIDI  
690503088X

KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK UNTUK MENCAPAI TARGET  
10 JUTA NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

[xii, 123 Halaman, 3 Tabel, 2 Lampiran, 6 Gambar, Bibliografi: 43 Buku, 10  
Peraturan, 2 Artikel Surat Kabar, 5 Website, (1953-2008)]

Penelitian mengenai peranan direktorat jenderal pajak dalam pencapaian target kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak, melakukan evaluasi implementasi kebijakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah tepat untuk mencapai target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam upaya pencapaian target kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *positivist social science* dan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang berarti tidak sampai menganalisis hubungan kasualitas antara berbagai aspek yang diteliti dan juga menggunakan teknik pengumpulan data sebagai dasar analisis antara lain Studi Kepustakaan, Observasi / lapangan dan wawancara terhadap nara sumber yang berkompeten.

Penelitian juga dilakukan untuk menganalisis efektifitas implementasi kebijakan tersebut. Analisis tersebut didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Edwar III (1980:9). Faktor-faktor tersebut adalah *communication, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structure*.

Terkait dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pengaruh komunikasi terhadap efektifitas implementasi kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak, menguraikan pengaruh sumber-sumber yang dimiliki oleh Direktorat jenderal Pajak terhadap efektifitas implementasi kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak, menguraikan pengaruh disposisi di Direktorat Jenderal Pajak terhadap efektifitas implementasi kebijakan

10 juta nomor pokok wajib pajak serta menguraikan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan direktorat jenderal pajak dalam pencapaian target kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak yang paling berat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Faktor-faktor seperti sumber-sumber, disposisi, struktur birokrasi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas implementasi kebijakan 10 juta nomor pokok wajib pajak, kecuali faktor komunikasi yang dianggap kurang efektif sehingga tidak sampai terhadap sasaran yang diharapkan. Walaupun dari sisi jumlah, 10 juta NPWP sebenarnya telah tercapai, namun tingkat akurasi banyak menimbulkan banyak pertanyaan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik bagi masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar untuk menambah pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, perlu disusun suatu sistem informasi tentang data base wajib pajak, sehingga tercipta suatu sistem kebersinambungan atas data-data yang dimiliki dan pemberian *privilege* khusus bagi Wajib Pajak yang terdaftar.

